

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH KECAMATAN BATUKLIANG UTARA

Jalan Pariwisata Aik Bukak Desa Teratak Nusa Tenggara Barat 83522 Website kec-bkulombotengah.go.id

for camat
Batukliang utara



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA 31 DESEMBER 2024

Kantor camat
batukliang utara



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Kantor Camat Batukliang Utara dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, ... Januari 2025

Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah,



H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 196712311991031118

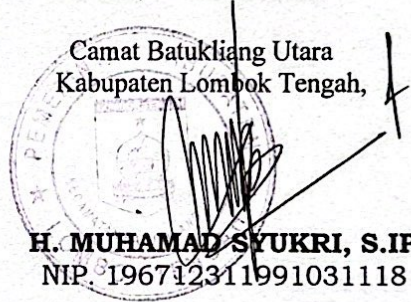
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teratak, ... Januari 2025

Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah,



H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
NIP. 196712311991031118

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Kantor Camat Batukliang Utara dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, ... Januari 2025

Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah,

H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 196712311991031118

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teratak, ... Januari 2025

Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah,

H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
NIP. 196712311991031118

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	vi
II. NERACA.....	vii
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	viii
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	ix
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	7
2.1 Kebijakan Keuangan.....	7
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	
Secara Umum	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	14
4.1 Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan	13
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	14
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	15
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD	15

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	18
5.1 Penjelasan atas pos-pos LRA	18
5.2 Pos-pos Neraca	22
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	30
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	35
6.1 Gambaran Umum OPD	35
6.2 Sumber Daya Kantor Camat Bataukliang Utara	36
BAB VII PENUTUP	37

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Tahun 2024	9
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024	10
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024	12
Tabel 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja	18
Tabel 5.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	19
Tabel 5.1.1.1.1 rincian detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	19
Tabel 5.1.4. rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	21
Tabel 5.2.2 Anggaran dan realisasi SiLPA	22
Tabel 5.2.1 Rincian Aset	22
Tabel 5.2.1.1 Rincian Aset Lancar.....	23
Tabel 5.50 Persediaan	23
Tabel 5.2.1.2 Daftar nilai asset tetap	24
Tabel 5.5.3 Daftar nilai asset tetap tanah	25
Tabel 5.2.1.2.2 Aset tetapperalatan dan mesin	25
Tabel 5.5.6 Penambahan dan pengurangan aset	25
Tabel 5.2.1.2.3 Aset tetap gedung dan bangunan	26
Tabel 5.2.1.2.4 Aset tetap jalan, jaringan dan Irigasi	27
Tabel 5.2.1 Rincian Kewajiban.....	28
Tabel 5.6.6 Rinnjian kewajiabn jangka pendek	28
Tabel 5.6.9 Rician uang belanja	29
Tabel 5.7.1 Realisasi Belanja barang Jasa.....	29
Tabel 5.3.1 Rincian beban operasional	30
Tabel 5.3.1.1 rincian beban pegawai.....	31
Tabel 5.3.1.2 Penjelasan selisih beban pegawai LO	32
Tabel 5.3.1.2 Rincian beban barang dan jasa	33
Tabel 5.3.1.3 Penjelasan selisih beban barang dan jasa-LO.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas:* Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan:* Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:* Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat:* Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan

ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.

- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1:

Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Batukliang Utara:

**1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Tujuan Program Terwujudnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan lima kegiatan dengan anggaran setelah

perubahan senilai Rp 1.753.356.183,00 terealisasi senilai Rp. 1.675.923.815,00 atau 95,58%

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Tujuan Program ini terwujudnya persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan pemerintah Daerah ke pemerintah kecamatan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan dua kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 59.719.000,00 terealisasi senilai Rp 59.467.000,00 atau 99,58%

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Tujuan Program ini meningkatnya kualitas Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan satu kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp.44.459.600,00 terealisasi senilai Rp.44.459.000,00 atau 100%

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tujuan Program ini untuk meningkatkan pranserta Masyarakat dan stakeholder dalam pengendalian keamanan dan ketertiban Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan satu kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 48.970.500,00 terealisasi senilai Rp. 48.970.500,00 atau 100%.

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Tujuan Program ini meningkatkan persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan satu kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 285.292.818,00 terealisasi senilai Rp. 285.090.100,00 atau 99,93%.

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Tujuan Program ini meningkatnya kualitas Pembangunan dan penyenggaraan pemerintah desa Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan satu kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 35.492.000,00 terealisasi senilai Rp. 35.487.000,00 atau 99,93%.

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Batukliang Utara Tahun 2024

No	uraian	Anggaran semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100
1	Belanja				
	Belanja Pegawai		1.334.838.090,00	1.307.105.546,00	97,92
	Belanja Barang dan Jasa		809.385.891,00	809.385.891,00	100,00
	Belanja Modal		83.066.120,00	82.140.000,00	98,89
	Jumlah		2.227.290.101,00	2.198.631.437,00	98,71

Realisasi Belanja lebih rendah dari anggaran senilai Rp. 2.227.290.101,- atau 96.96% disebabkan karena:

1. Kurangnya jumlah ASN khususnya pejabat struktural sehingga menyebabkan penyerapan anggaran untuk gaji dan tunjangan kurang untuk di realisasikan
2. Terjadi selisih harga di SSH dengan harga riil di lapangan

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Belanja kantor Camat Batukliang Utara Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Sasan Program: Nilai SAKIP OPD	1753356183	1675923815	95,58%
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	26.648.279,00	26.617.500,00	99,88%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	1.365.993.090,00	1.318.211.535,00	96,50%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.081.180,00	199.435.508,00	94,04%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	23.545.000,00	13.517.522,00	57,41%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Barang Milik Daerah kondisi baik	125.088.634,00	118.141.750,00	94,45%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sasan Program: Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	59.719.000,00	59.467.000,00	99,58%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.858.000,00	15.774.000,00	99,47%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	43.861.000,00	43.693.000,00	99,62%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Sasan Program: Persentase usulan masyarakat yang disetujui	44.459.600,00	44.459.000,00	100,00%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa	44.459.600,00	44.459.000,00	100,00%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sasan Program: Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	48.970.500,00	48.970.500,00	100,00%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	48.970.500,00	48.970.500,00	100,00%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasan Program: Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	285.292.818,00	285.090.100,00	99,93%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	285.292.818,00	285.090.100,00	99,93%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sasan Program: Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	35.492.000,00	35.487.000,00	99,99%
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.492.000,00	35.487.000,00	99,99%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No	Urian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		% Tahun 202n	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	Belanja Pegawai	1.334.838.090,00	1.307.105.546,00	1.564.827.243,00	97,92	83,53
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	870.523.590,00	867.611.429,00	1.061.439.610,00	99,67	81,74
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	450.370.500,00	426.075.117,00	496.436.633,00	94,61	85,83
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.944.000,00	13.419.000,00	6.951.000,00	96,23	193,05
	Belanja Barang dan Jasa	809.385.891,00	770.391.780,00	671.947.673,00	95,18	114,65
	Belanja Barang	509.890.379,00	502.413.500,00	468.343.250,00	98,53	107,27
	Belanja Jasa	212.453.112,00	202.303.772,00	137.489.863,00	95,22	147,14
	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	29.438.000,00	17.870.508,00	20.714.560,00	60,71	86,27
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.104.400,00	44.304.000,00	45.400.000,00	81,89	97,59
2	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.144.223.981,00	2.077.497.326,00	2.236.774.916,00	96,89	92,88
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.066.120,00	82.140.000,00	331.495.000,00	98,89	24,78
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.206.590,00	49.190.000,00	56.195.000,00	99,97	87,53
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.206.590,00	49.190.000,00	56.195.000,00	99,97	87,53
	Belanja Modal Mebel	49.206.590,00	49.190.000,00	23.925.000,00	99,97	205,60
	Belanja Modal Komputer	33.859.530,00	32.950.000,00	30.300.000,00	97,31	108,75
	Belanja Modal Komputer Unit	23.481.130,00	22.750.000,00	15.000.000,00	96,89	151,67
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23.481.130,00	22.750.000,00	15.000.000,00	96,89	151,67
	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.378.400,00	10.200.000,00	15.300.000,00	98,28	66,67
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.378.400,00	10.200.000,00	15.300.000,00	98,28	66,67
	JUMLAH BELANJA MODAL	83.066.120,00	82.140.000,00	331.495.000,00	98,89	24,78
	408.632.590,00	2.227.290.101,00	2.159.637.326,00	2.568.269.916,00	96,96	84,09

Dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp. 67.652.775,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. 2.227.290.101,00 terealisasi Rp. 2.159.637.326,00 atau 96.96%.

Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi senilai 84.09%, yaitu Rp. 2.568.269.916,00 Pada tahun 2023 menjadi Rp.2.159.637.326,00 Pada tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

- c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);
Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial
Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang

mengibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis AkruaI untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.

- c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 20XX diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. BELANJA

Realisasi belanja Kecamatan Batukliang Utara yang tertuang dalam DPA perubahan TA 2024 adalah sebesar Rp. 2.159.637.326,00 mencapai 96.96% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp. 2.227.290.101,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	2.144.223,00	2.077.497.326	96.89	2.236.774.916,00
2.	Belanja Modal	83.066.120,00	82.140.000,00	98.89	331.495.000,00
Jumlah		2.227.290.101,00	2.159.637.326,00	96.96	2.568.269.916,00

5.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp 2.077.497.326,00 atau mencapai 96.89% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp. 2.144.223,981,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	870.523.590,00	867.611.429,00	99.67	1.061.439.610,00
2	Belanja Barang Jasa	809.385.891,00	770.391.780,00	95.18	671.947.673,00
	Jumlah	2.144.223,981,00	2.077.497.326	96.89	2.236.774.916,00

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.307.105.546,- atau mencapai 97.92% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp. 1.334.839.089,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.1.1 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

NO	URAIAN	2024			2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Pegawai	1.334.839.089,00	1.307.105.546,00	97,92	1.564.827.243,00
a	Gaji dan Tunjangan	870.523.590,00	867.611.429,00	99,67	1.061.439.610,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	870.523.590,00	867.611.429,00	99,67	1.061.439.610,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	687.738.250,00	687.737.250,00	100,00	817.777.600,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	70.299.222,00	67.661.002,00	96,25	95.497.784,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	58.170.666,00	58.170.000,00	100,00	74.830.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umu	15.885.500,00	15.885.000,00	100,00	19.190.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	36.698.935,00	36.427.260,00	99,26	49.824.960,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan	1.723.167,00	1.723.067,00	99,99	4.308.703,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.850,00	7.850,00	100,00	10.563,00
b	Belanja Tambahan Penghasilan ASI	464.315.499,00	439.494.117,00	94,61	503.387.633,00
	Tambahan Penghasilan berdasarka	450.370.500,00	426.075.117,00	94,61	496.436.633,00
	Tambahan Penghasilan berdasarka	13.944.999,00	13.419.000,00	96.23	6.951.000,00
	JUMLAH	1.334.839.089,00	1.307.105.546,00	97,92	1.564.827.243,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

Terjadi kekosongan beberapa pejabat struktural di lingkup kantor camat batukliang utara ini berdampak pada tidak terbayarnya gaji dan tunjangan.

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 770.391.780 atau mencapai 95.18% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp. 809.385.891. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.1.2 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	2024			2023
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
2	3	4	5	6
Belanja Barang dan Jasa	809.385.891,00	770.391.780,00	95,18	671.947.673,00
Belanja Barang	509.890.379,00	502.413.500,00	98,53	468.343.250,00
a Belanja Barang Pakai Habis	509.890.379,00	502.413.500,00	98,53	468.343.250,00
Belanja Jasa	212.453.112,00	202.303.772,00	95,22	137.489.863,00
a Belanja Jasa Kantor	192.857.794,00	182.708.772,00	94,74	125.068.164,00
b Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.152.000,00	1.152.000,00	100,00	448.699,00
c Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.543.318,00	14.543.000,00	100,00	11.973.000,00
d Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	
e Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
f Perjalanan Dinas	29.438.000,00	17.870.508,00	60,71	20.714.560,00
g Hadiah	54.104.400,00	44.304.000,00	81,89	45.400.000,00
JUMLAH	809.385.891,00	770.391.780,00	95,18	671.947.673,00

Sebab-sebab tinggi capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan bertambahnya rincian belanja dan bertambahnya kebutuhan untuk menunjang kegiatan di kantor camat batukliang utara

5.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp. 82.140.000,00 atau

mencapai 98.89% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp. 83.066.120,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

NO	URAIAN	2024			2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Modal	83.066.120,00	82.140.000,00	98,89	54.225.000,00
1	1 Belanja Mebel	49.206.590,00	49.190.000,00	99,97	23.925.000,00
	2 Belanja Komputer	23.481.130,00	22.750.000,00	96,89	15.000.000,00
	3 Belanja Peralatan Komputer	10.378.400,00	10.200.000,00	98,28	15.300.000,00
	JUMLAH	83.066.120,00	82.140.000,00	98,89	54.225.000,00

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp. 2.159.637.326, Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp. 2.227.290.101, sehingga terjadi Surplus realisasi APBD sebesar Rp. (2.159.637.326) atau (96.96)% dari anggaran sebesar (Rp. 2.227.290.101) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja	2.227.290.102	2.159.637.326	96.96	2.568.269.916
	Surplus/ (Defisit)	(2.227.290.101)	(2.159.637.326)	96.96	2.568.269.916

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran atau jumlah Surplus/(Defisit) ditambah dengan jumlah Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22. Anggaran dan Realisasi SiLPA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Surplus/(Defisit)	(2.227.290.101)	(2.159.637.326)	96.96	2.568.269.916
SiLPA		(2.227.290.101)	(2.159.637.326)	96.96	2.568.269.916

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Kantor Camat Batukliang Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 4.987.911.594,- dan Rp. 5.028.481.422,- Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.2.1. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	504.000,-	0
2	Investasi Jangka Panjang	0	0
3	Aset Tetap	4.987.407.594,-	5.028.481.422,-
4	Properti Investasi	0	0
5	Aset Lainnya	0	0
	Jumlah	4.987.911.594,-	5.028.481.422,-

Berikut rincian per item aset.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 504.000,- dan Rp. 0 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.2.1.1. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	0	0
2	Piutang	0	0
3	Penyisihan Piutang	0	0
4	Beban dibayar dimuka	0	0
5	Persediaan	504.000,-	0
	Jumlah	504.000,-	0

5.3.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 504.000 dan Rp. 0 Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.50 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	<i>stock opname</i>	504.000	0
2			
3			
	Jumlah	504.000	0

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp..dan Rp... Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.2.1.2. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	4.063.600.000,00	4.063.600.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.127.998.930,00	1.045.858.930,00
3	Gedung dan Bangunan	831.338.500,00	831.338.500,00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	7.187.500,00	7.187.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(1.042.717.336,00)	(919.503.508,00)
	Jumlah Bersih	4.987.407.594,00	5.028.481.422,00

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 4.063.600.000,00 dan Rp. 4.063.600.000,00 Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.3. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah dan Bangunan	4.063.600.000,00	4.063.600.000,00

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 1.127.998.930,00 dan Rp. 1.045.858.930,00 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.1.2.2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	1.127.998.930,00	1.045.858.930,00

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp.

1.127.998.930,00 dan pengurangan senilai Rp. 82140000 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.56. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	1.045.858.930,00
II	Penambahan	
	1 Belanja Modal TA 2024	0
	2 Mutasi antar OPD	0
	3 Reklasifikasi Antar KIB	0
	4 Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	0
	5 Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	0
	6 Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	0
	7 Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	0
	Jumlah Mutasi Tambah	0
III	Pengurangan	
	1 Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	
	2 Ekstracomtabel	
	3 Dihilangkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
	4 Reklas ke KIB Lainnya	
	5 Mutasi antar OPD	
	6 Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 831.338.500,00 dan Rp. 831.338.500,00 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : **5.2.1.2.3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	831.338.500,00	831.338.500,00

5.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 7.187.500,00 dan Rp. 7.187.500,00 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel **5.2.1.2.4. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	7.187.500,00	7.187.500,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.60 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

5.2.1.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.(1.042.717.336,00) dan Rp. (919.503.508,00)

5.2.1. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara

hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp35.417.590,00 dan Rp. 35.462.414,00 Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.2.1. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	35.417.590,00	35.462.414,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0	0
	Jumlah	35.417.590,00	35.462.414,00

5.2.1.1. Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp35.417.590, dan Rp. 35.462.414,00 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.66. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2	Utang Bunga	0	0
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
5	Utang Belanja	35.231.254,00	35.462.414,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
7	Utang Transfer	0	0

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
	Jumlah	35.231.254,00	35.462.414,00

5.2.1.2. Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.186.336,00 dan Rp. 62.380,00 Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.69. Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	186.336,00	62.380,00
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0	0
3	Utang Belanja Modal	0	0
4	Utang Belanja Bansos	0	0
5	Utang Belanja Transfer	0	0
	Total	186.336,00	62.380,00

5.2.1.2.1 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 186.336,00 dan Rp. **62.380,00** Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	86.336	62.380
	Total	86.336	62.380

EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 4.952.494.004,00 dan Rp. 4.993.019.008,00 Nilai ekuitas menurun senilai Rp-40.525.004 atau sebesar 0,9% di dibandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 4.993.019.008,00

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kantor Camat Batukliang Utara untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. **2.200.162.330,00** dan Rp. **2.352.211.474,00** Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Bendahara Pengeluaran selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	1.306.936.766,00	1.558.429.560,00
2	Beban Barang dan Jasa	770.011.736,00	682.018.553,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00
Jumlah		2.200.162.330,00	2.352.211.474,00

5.3.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp. 1.306.936.766,00 dan Rp. 1.558.429.560,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	867.611.429,00	1.061.076.340,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	687.737.250,00 0	817.414.600,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	67.661.002,00	95.497.784,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	58.170.000,00	74.830.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	0	0
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.885.000,00	19.190.000,00
f.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.723.067,00	4.308.703,00
g.	Beban Pembulatan Gaji ASN	7.850,00	10.293,00
h.	Beban Tunjangan Beras PNS	36.427.260,00	49.824.960,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	425.906.337,00	490.402.220,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	425.906.337,00	490.402.220,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.419.000,00	6.951.000,00
Jumlah		1.306.936.766,00	1.558.429.560,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

- a. Terjadi kekosongan pegawai yang di sebabkan pensiun dan meninggal

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 2.077.497.326,00 (Rp. 2.077.497.326,00 – Rp. 2.200.162.330,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	168.780,-000
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	35.231.254,00
Utang Gaji dan Tunjangan	,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	,00
Utang Jasa Pelayanan	,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	,00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	35.400.034,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	-168.780,00

5.3.1.2. Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp. 770.011.736,00 dan Rp. 682.018.553,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	501.909.500,00	
1	Beban Barang Pakai Habis	501.909.500,00	0,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
3	Dst..		
B	Beban Jasa	202.427.728,00	
1	Beban Jasa Kantor	182.832.728,00	
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.152.000,00	
3.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	14.543.000,00	
4.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.900.000,00	
C.	Beban Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	
D.	Beban Perjalanan Dinas	17.870.508,00	
	Beban Perjalanan Dinas dalam daerah	17.870.508,00	
E	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.304.000,00	
	Jumlah	770.011.736,00	682.018.553,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp0,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan kebutuhan yang banyak guna menunjang kelancaran kegiatan di kantor camat batukliang utara.

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. -380.044,- (Rp. 770.011.736, - Rp. 770.391.780,-). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3. Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	380.044,-
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	186.336,-
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap- <i>Extracomtable</i>	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	62.380,-
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	504.000,-
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	0,00
e	Reklas Persediaan Kadaluarsa	0,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	-380.044,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kantor Camat Batukliang Utara berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Kantor Camat Batukliang Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Kantor Camat Batukliang Utara Lombok Tengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

6.2. 4.993.019.008,00 4.993.019.008,00 Sumber Daya Kantor Camat Batukliang Utara

Sumber daya yang dimiliki oleh kantor Camat Batukliang Utara sesuai dengan tabel di bawah ini

NO	NIP	NAMA	JABATAN	PANGKAT TERAKHIR	KENAIKAN PANGKAT
1	2	3	4	5	6
1.	196712311991031118	Muhamad Syukri, S.I.P.	Camat	IV/a	IV/b
2.	197809072003121006	Suhartono, S.I.P.	Sekretaris Kecamatan	III/d	IV/a
3.	196612311986021051	Asmuni, S.Adm.	Kepala Seksi Trantib	IV/a	IV/a
4.	196812311988031092	Hamdi Masykur, S.Sos.	Kepala Seksi Pemerintahan	III/d	IV/a
5.	197210092008011013	Ahmad Junaidi, S.I.P.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	III/d	IV/a
6.	197712301999021001	Lalu Muslihan, S.Adm.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	III/d	IV/a
7.	197102212006041001	Lalu Arya Wirabakti, S.I.P.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	III/b	III/c
8.	197912292010011004	M. Syafran Undong, A.Md.	Kepala Sub Bagian Pere dan Keuangan	III/b	III/c
9.	196612312007011425	H. Saharuddin, S.I.P.	Bendahara	III/b	III/b
10.	196911242006041002	Sugiyono Achyar	Pengadministrasi Umum	III/a	III/a
11.	197012312009011029	Abdurrahman	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	II/d	III/a
12.	198412312014071014	Tirto Handoyo	Pengadministrasi Umum	II/c	II/d

BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih, kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Teratak, Januari 2025
Camat Batukliang Utara

H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 196712311991031118



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Raden Pугuh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh satu bulan Desember tahun 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/37/TT/INSP/2024 dengan perhitungan kas sebagai berikut:

Saldo buku yang ditetapkan		
Penerimaan periode 2 Januari s/d 31 Desember 2024	Rp. 2.194.300.016,-	
Pengeluaran periode 2 Januari s/d 31 Desember 2024	Rp. 2.162.274.546,-	
STS TU	Rp. 9.800.000,-	
STS GU	Rp. 22.225.470,-	
Saldo buku		Rp. 0,-

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari :

Uang tunai di brankas		Rp. 0,-
Uang kertas	Rp. 0,-	
Uang logam	Rp. 0,-	
Uang di rekening		Rp. 0,-
Jumlah kas		Rp. 0,-
Selisih kas		Rp. 0,-

Penjelasan atas selisih kas : -

Catatan : -

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengeluaran

H. SAHARUDDIN, S.IP
NIP. 196612312007011425

Tim Pemeriksa:

1. Naily Indriaty /
NIP. 197608132000032003

2. I ketut Budiarta
NIP.19761122010011003

3. Taupikurrahman
NIP. 198211012009011004

Mengetahui,

Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah,

MUHAMMAD SYUKRI, S.IP
NIP. 196712311991031118



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA

Jln. Pariwisata Aik Bukak Teratak

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H.MUHAMAD SYUKRI, S.IP**
NIP : 196712311991031118
Jabatan : CAMAT BATUKLIANG UTARA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan persediaan barang habis pakai kepada :

Nama : **ABDURRAHMAN**
NIP : 1971012312009011029
Jabatan : Bendahara Barang pada Kantor Camat Batukliang Utara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :

Jumlah barang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut :

No	Nama Barang	Jml. Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Kertas F4	2	rim	75.000	150.000
2	Kertas A4	2	rim	62.000	124.000
3	Tinta printer	2	Botol	115.000	230.000
	J U M L A H				504.000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Barang

ABDURRAHMAN
NIP. 1971012312009011029

Teratak, 31 Desember 2024
Yang Memeriksa/Pengguna Anggaran,



H.MUHAMAD SYUKRI, S.IP
NIP. 196712311991031118



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT

Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung C lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertandatangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1	Naily Indriaty	Pengendali Teknis
2	I Ktut budiarta	Ketua TIM
3	Taupikurrahman ishadi	Anggota

Sesuai dengans urat perintah tugas nomor 700/37/TT/INSP/2024 Tanggal 27 Desember 2024, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 31 Desember 2024 kepada :

Nama Lengkap : ABDURRAHMAN

Jabatan : Bendahara Barang pada Kantor Camat Batukliang utara

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagaiberikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
1.	Kertas F4	2	rim
2.	Kertas A4	2	rim
3.	Tinta printer	2	rim

Menyetujui
Pengurus Barang
Kantor Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah

(ABDURRAHMAN)

NIP. 197012312009011029

Mengetahui
Kepala Dinas / Camat Batukliang Utara.
Kabupaten Lombok Tengah



(H. MUHAMMAD SYUKRI, S.IP)
NIP. 196712311991031118

Tim Pemeriksa:

1. Naily Indriaty /
NIP. 197608132000032003

2. I ketut Budiarta
NIP.197611122010011003

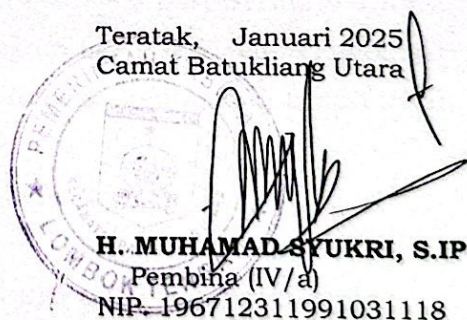
3. Taupikurrahman Ishadi
NIP. 198211012009011004

BAB VII PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih, kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Teratak, Januari 2025
Camat Batukliang Utara



H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 196712311991031118

BERITA ACARA REKONSILIASI

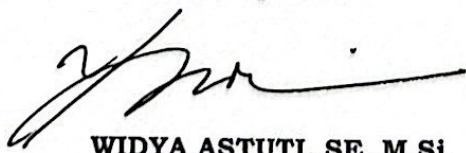
Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Batukliang Utara yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024
5. Laporan Perubahan SAL (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024
6. Laporan Arus Kas (Khusus BLUD) Per Tanggal 31 Desember 2024

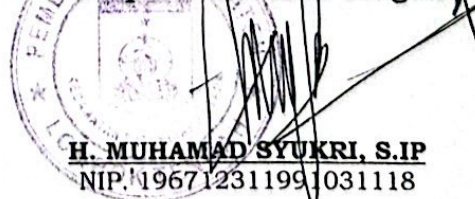
Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

**a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD,
Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan**


WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP: 197503022000032006

**Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Kantor Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah**


H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
NIP: 196712311991031118

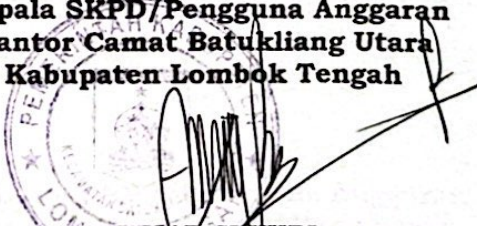
PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih 5 = 3 - 4	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi 8 = 4+7
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8 = 4+7
5	BELANJA DAERAH	2.159.637.326,00	2.159.637.326,00				2.159.637.326,00
5.2	BELANJA OPERASI	2.077.497.326,00	2.077.497.326,00				2.077.497.326,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.307.105.546,00	1.307.105.546,00				1.307.105.546,00
5.1.02	Belanja barang dan Jasa	770.391.780,00	770.391.780,00				770.391.780,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.077.497.326,00	2.077.497.326,00				2.077.497.326,00
5.2	BELANJA MODAL	82.140.000,00	82.140.000,00				82.140.000,00
5.1.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.140.000,00	82.140.000,00				82.140.000,00
5.1.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-				-
	JUMLAH BELANJA	2.159.637.326,00	2.159.637.326,00				2.159.637.326,00

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
 NIP: 197503022000032006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Kantor Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah


H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
 NIP: 196712311991031118

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos Neraca	LRA Menurut		Selisih 5 = 3 - 4	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi 8 = 4+7
		SKPKD 3	SKPD 4		SKPKD 6	SKPD 7	
5.3.1	Aset	4.987.911.594,00	4.987.911.594,00				4.987.911.594,00
5.3.1.1.5	Persediaan	504.000,00	2.077.497.326,00				2.077.497.326,00
5.3.1.3	Aset Tetap	4.987.407.594,00	4.987.407.594,00	-	-	-	4.987.407.594,00
5.3.1.3	Tanah	4.063.600.000,00	4.063.600.000,00				4.063.600.000,00
5.3.1.3.1	Peralatan dan Mesin	1.127.998.930,00	1.127.998.930,00				1.127.998.930,00
5.3.1.3.2	Gedung dan Bangunan	831.338.500,00	831.338.500,00				831.338.500,00
5.3.1.3.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.187.500,00	7.187.500,00				7.187.500,00
5.3.1.3.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-				-
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.042.717.336,00)	(1.042.717.336,00)				(1.042.717.336,00)
5.3.3.	EKUITAS	4.987.911.594,00	4.987.911.594,00				4.987.911.594,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		- 4.987.911.594,00	- 4.987.911.594,00				- 4.987.911.594,00

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP: 197503022000032006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Kantor Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah



H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
NIP. 196712311991031118

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

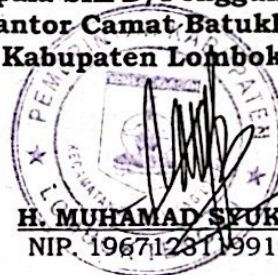
No	Uraian / Rincian Pos-pos LO	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8 = 4+7
5.4.2	BEBAN DAERAH	2.200.162.330,00	2.200.162.330,00				2.200.162.330,00
5.4.2.1	BEBAN OPERASI	2.200.162.330,00	2.200.162.330,00				2.200.162.330,00
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	1.306.936.766,00	1.306.936.766,00				1.306.936.766,00
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	770.011.736,00	770.011.736,00				770.011.736,00
5.4.2.2	Beban Bunga	-	-				-
5.4.2.3	Beban Subsidi						
5.4.2.4	Beban Hibah	-	-				-
5.4.2.5	Beban Bantuan Sosial	-	-				-
5.4.2.6	Beban Penyisihan Piutang	-	-				-
5.4.2.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	123.213.828,00	123.213.828,00				123.213.828,00
5.4.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	- 2.200.162.330,00	- 2.200.162.330,00				- 2.200.162.330,00

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP: 197503022000032006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
Kantor Camat Batukliang Utara
Kabupaten Lombok Tengah

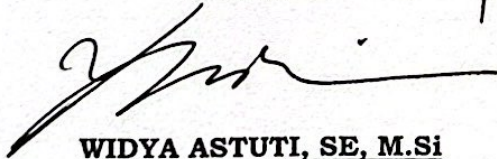


H. MUHAMAD SPUKRI, S.IP
NIP. 196712311991031118

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

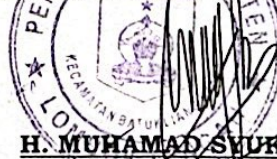
No	Uraian / Rincian Pos-pos LPE	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8 = 4 + 7
5.6.1	EKUITAS AWAL	4.993.019.008,00	4.993.019.008,00	-	-	-	4.993.019.008,00
5.6.2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	- 2.200.162.330,00	- 2.200.162.330,00	-	-	-	- 2.200.162.330,00
5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-	-	-	-	-
5.6.3.1	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	-	-	-	-	-	-
5.6.3.2	Koreksi Ekuitas - Investasi	-	-	-	-	-	-
5.6.3.3	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
5.6.3.4	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
5.6.3.5	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	-	-	-	-	-	-
5.6.3	RK PPKD	2.159.637.326,00	2.159.637.326,00	-	-	-	2.159.637.326,00

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
 Kepala Bidang Akuntansi dan
 Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
 NIP: 197503022000032006

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran
 Kantor Camat Batukliang Utara
 Kabupaten Lombok Tengah



H. MUHAMAD SYUKRI, S.IP
 NIP. 196712311991031118